



EKONOMI POLITIK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (PPTKH): STUDI KASUS DESA SUKASLAMET, KABUPATEN INDRAMAYU

ELVARA DWI SATRIA



**ILMU PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Ekonomi Politik Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH): Studi Kasus Desa Sukaslamet, Kabupaten Indramayu” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2024

Elvara Dwi Satria
P0502201019

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



RINGKASAN

ELVARA DWI SATRIA. Ekonomi Politik Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH): Studi Kasus Desa Sukaslamet, Kabupaten Indramayu. Dibimbing oleh SUDARSONO SOEDOMO dan RINA MARDIANA.

Konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan telah menjadi permasalahan mendasar pada areal kelola Perhutani. Sejarah praktik penguasaan lahan di areal kelola Perhutani menyebabkan permasalahan keterbatasan akses petani penggarap terhadap kawasan hutan, yang kemudian menjadi faktor pendorong terjadinya konflik tenurial. Sejak tahun 2017, Pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan. Melalui kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan. Terbitnya seperangkat kebijakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja turut mendorong pelaksanaan kebijakan PPTKH.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika lokal kontestasi penguasaan lahan dalam kawasan hutan serta implikasinya terhadap kebijakan PPTKH di Pulau Jawa. Penelitian dilakukan di Desa Sukaslamet, Kabupaten Indramayu yang merupakan salah satu desa yang beririsan dengan areal kelola Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus analisis pada dinamika visibilitas konflik serta kontestasi aktor dalam konflik penguasaan lahan. Penelaahan visibilitas konflik dan kontestasi aktor menggunakan kerangka penilaian visibilitas konflik berbasis aktor serta pendekatan *Actor-Centred Power* (ACP).

Lintasan sejarah praktik penguasaan lahan di Desa Sukaslamet menunjukkan serangkaian proses teritorialisasi Negara pada kawasan hutan, serta adanya kontra-teritorialisasi. Sejarah teritorialisasi negara pada kawasan hutan menyebabkan jaringan penguasaan lahan di tingkat tapak serta ketidakpastian pada kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan gradasi dan historiografi, serta dinamika aktor dalam konflik penguasaan lahan pada areal kelola Perhutani. Dinamika konflik penguasaan lahan pada praktik pengelolaan hutan oleh Perhutani telah menghidupkan praktik teritorialisasi lokal oleh petani penggarap. Selain itu, pergeseran kekuasaan aktor menyebabkan perubahan eskalasi dalam kontinum konflik. Penetapan kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sebagai upaya resolusi konflik justru dapat menyebabkan kontestasi baru dengan mengundang aktor kuat lainnya.

Akhirnya, kebijakan PPTKH sebagai bentuk perlindungan hak-hak petani penggarap atas kawasan hutan berpotensi mengalami hambatan dalam implementasinya. Pola penyelesaian dalam kebijakan PPTKH yang terbatas pada skema Perhutanan Sosial (PS) tidak menasar permasalahan mendasar terkait pendudukan kawasan hutan di tingkat tapak. Skema PS pada areal KHDPK tidak dapat mengoreksi permasalahan ketidakpastian dan inefisiensi kawasan hutan, serta situasi ketidakpercayaan politik kepada birokrasi kehutanan.

Kata kunci: kebijakan PPTKH, penguasaan lahan, visibilitas konflik, kontestasi aktor, *Actor Centred Power*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

IPB University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

SUMMARY

ELVARA DWI SATTRIA. The Political Economy of Land Tenure Settlement in Forest Areas (PPTKH): A Case Study of Sukaslamet Village, Indramayu Regency. Supervised by SUDARSONO SOEDOMO and RINA MARDIANA.

Land tenure conflicts in forest areas have become a fundamental problem in the Perhutani management area. The history of land tenure practices in Perhutani's management area has caused the problem of limited access of peasants to forest areas, which later became a driving factor in tenurial conflicts. Since 2017, the Government has been trying to resolve various land tenure conflicts in forest areas. Through the Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) policy, the Government seeks to protect the rights of peasants in forest areas. The issuance of policies derived from the Job Creation Law has also encouraged the implementation of the PPTKH policy.

This study aims to analyze the local dynamics of land tenure contestation in forest areas and its implications for PPTKH policy in Java. The research was conducted in Sukaslamet Village, Indramayu Regency, one of the villages that intersects with the Perhutani management area of Indramayu Forest Management Unit (KPH). The study uses a qualitative approach focusing on analyzing the dynamics of conflict visibility and actor contestation in land tenure conflicts. Examining conflict visibility and actor contestation uses an actor-based conflict visibility assessment framework and the Actor-Centred Power (ACP) approach.

The historical trajectory of land tenure practices in Sukaslamet Village shows a series of processes of state territorialization of forest areas and counter-territorialization. The state's history of territorializing forest areas has led to land tenure networks at the site level and uncertainty in forest areas. The study results show gradations, historiography, and actor dynamics in land tenure conflicts in Perhutani-managed areas. The dynamics of land tenure conflicts in Perhutani's forest management practices have revived the practice of local territorialization by peasants. In addition, actor power shifts cause an escalation in the conflict continuum. Establishing the Forest Area with Special Management (KHDPK) policy to resolve conflicts can cause new contestations by inviting other powerful actors.

Finally, the PPTKH policy as a form of protection of peasants' rights to forest areas has the potential to experience obstacles in its implementation. The settlement pattern in the PPTKH policy, which is limited to the Social Forestry (SF) scheme, does not target the fundamental problems related to the occupation of forest areas at the site level. The SF scheme in the KHDPK area cannot correct the problems of forest area uncertainty and inefficiency and the political distrust of the forestry bureaucracy.

Keywords: PPTKH policy, land tenure, conflict visibility, actor contestation, Actor Centred Power

Judul Tesis : Ekonomi Politik Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH): Studi Kasus Desa Sukaslamet, Kabupaten Indramayu

Nama : Elvara Dwi Satria
NIM : P0502201019

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.S., MPPA



Pembimbing 2:
Dr. rer. nat. Rina Mardiana, S.P., M.Si

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Prof. Dr. Ir. Hadi Susilo Arifin, M.S
NIP. 195911061985011001



Dekan Sekolah Pascasarjana:
Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc. F.Trop
NIP. 197003291996081001



Tanggal Ujian: 29 Mei 2024

Tanggal Lulus: 28 Juni 2024

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Ekonomi Politik Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH): Studi Kasus Desa Sukaslamet, Kabupaten Indramayu”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, MS, MPPA dan Ibu Dr. rer. nat. Rina Mardiana, SP, MSi selaku komisi pembimbing yang telah mendukung selama proses penyusunan tesis ini; Bapak Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS selaku penguji pada ujian tesis; Keluarga besar Yayasan Patera Nusantara Lestari yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian; Keluarga besar PSL angkatan 2020 yang senantiasa mendukung, membantu dan saling menguatkan satu sama lain dalam menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana IPB; Serta berbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana IPB.

Penulis sadari tesis ini memiliki banyak kelemahan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan tesis ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Juni 2024

Elvara Dwi Satria

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pendekatan Ekonomi Politik	4
2.2 Teritorialisasi Kawasan Hutan	5
2.3 Penguasaan Lahan melalui Klaim Kawasan Hutan	5
2.4 Teori Konflik dan Visibilitas Konflik	6
2.5 Teori Kekuasaan dan <i>Actor-Centred Power</i> (ACP)	7
III METODE	9
3.1 Kerangka Pemikiran	9
3.2 Metode dan Strategi Penelitian	10
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	10
3.4 Teknik Pengumpulan Data	11
3.5 Analisis Data	11
IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	12
4.1 Kondisi Umum Wilayah dan Prasarana	12
4.2 Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan	13
4.3 Demografi dan Kependudukan	14
V HASIL DAN PEMBAHASAN	16
5.1 Sejarah Penguasaan Lahan di KPH Indramayu	16
5.2 Dinamika Konflik Penguasaan Lahan di Desa Sukaslamet	22
5.3 Visibilitas Konflik Penguasaan Lahan	27
5.4 Kontestasi Aktor dan Relasi Kekuasaan	30
5.5 Implikasi Kebijakan PPTKH	33
VI SIMPULAN DAN SARAN	38
6.1 Simpulan	38
6.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	47
RIWAYAT HIDUP	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.